

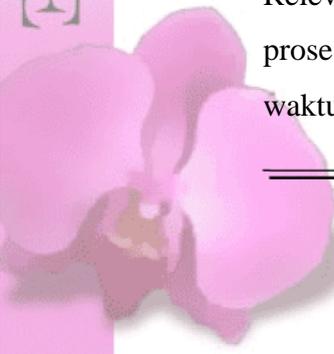
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

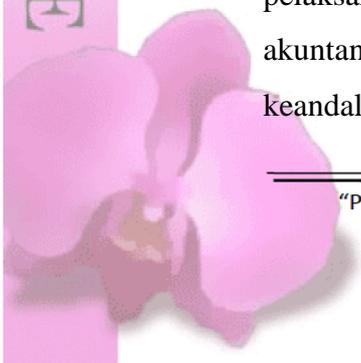
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perkembangan teknologi dan ekonomi setiap Negara membutuhkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik merupakan bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. *Good governance* dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010) antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Relevan berarti laporan keuangan memuat informasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta penyajiannya dilakukan secara tepat waktu dan lengkap. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian



yang menyesatkan dan kesalahan material, penyajiannya jujur sesuai fakta, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Laporan keuangan yang dihasilkan juga harus dapat digunakan secara umum bukan hanya pihak tertentu sehingga informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi dari laporan keuangan juga dapat dipahami dengan lebih baik apabila menggunakan istilah yang sesuai dengan kemampuan para penggunanya. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Nasaruddin (2008) “Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan”.

Dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik tentunya SDM harus memahami Standar Akuntansi Keuangan Daerah. Selain Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang mempengaruhi informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah melalui



penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah daerah (Rahayu, dkk. 2014). Penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu instansi sehingga sistem pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu instansi untuk menjaga kekayaan perusahaan tersebut (Erwin Bahtiar, 2013). Menurut Nurillah dan Muid D (2014) Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan serta tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada pemerintahan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain SDM setiap instansi pasti membutuhkan teknologi informasi yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)/ Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDA) yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Fenomena yang terjadi di kabupaten Flores Timur berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada beberapa tahun belakangan ini adalah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti tidak ada peningkatan opini dari tahun ke tahunnya. Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan apabila: Tidak ada bukti yang kompeten dan mencukupi atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, dan apabila Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

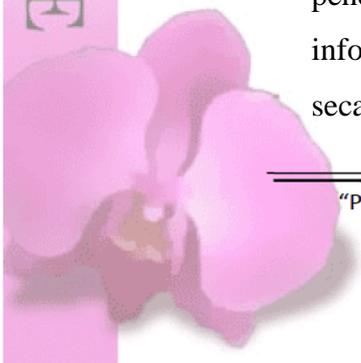
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, makapermasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur?
2. Apakah penerapan sistem skuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur?
5. Apakah kompetensi sumber daya Manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama - sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kondisi permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Untuk mengetahui apakah pengaruh kompetensi sumber daya Manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama - sama atau secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi terkait seperti Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mengatasi kualitas laporan keuangan yang belum baik.

2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah